

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **LKjIP 2020**

## **Dinas Sosial Kabupaten Bone**



Hapuskan Perbedaan



dengan kebebasan  
**BERKARYA**  
BERKARYA  
dengan kebebasan



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023. LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Bone pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 7 (*Tujuh*) indikator kinerja utama, terdapat 5 (*Lima*) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial

Kabupaten Bone Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

2 Februari 2020

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Bone

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	22
1.5 Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja	23
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 24
2.1 Rencana Strategis	24
2.1.1 Visi dan Misi BUPATI DAN WAKIL BUPATI	24
2.1.2 Tujuan dan Indikator Kinerja	27
2.1.3 Sasaran dan Indikator Kinerja	28
2.1.4 Program untuk Pencapaian Sasaran	29
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2020	31
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 36
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	37
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja	38
A. Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	38
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	38
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	44
c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Periode Akhir Renstra	45
d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	46

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	46
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
B. Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	56
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	56
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	58
c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Periode Akhir Renstra	58
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	59
e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	59
3.1.3 Realisasi Anggaran	61
<b>BAB IV PENUTUP</b>	65
<b>LAMPIRAN</b>	...
Perjanjian Kinerja 2020	
Indikator Kinerja Utama	
Rencana Aksi	
Pengukuran Rencana Aksi	

**Daftar Tabel**

Tabel 1.1	Jumlah Porsenil Dinas Sosial Kabupaten Bone	20
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone	28
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone	29
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020	30
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2020	31
Tabel 2.5	IKU Dinas Sosial Kabupaten Bone	32
Tabel 2.6	Rencana Belanja Dinas Sosial Kab. Bone TA. 2020	32
Tabel 2.7	Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2020	33
Tabel 2.8	Alokasi Anggaran Penunjang Kinerja Tahun Anggaran 2020	35
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal	37
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran	37
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama	38
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	39
Tabel 3.5	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	45
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun ini dengan Renstra Tahun 2018-2023 Sasaran 1	46
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1	47
Tabel 3.8	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH	51
Tabel 3.9	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BPNT	53
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	57
Tabel 3.11	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	59
Tabel 3.12	Perbandingan dengan Realissi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra 2018-2023 Sasaran 2	59
Tabel 3.13	Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2020	63

**Daftar Gambar**

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial Kab. Bone	4
------------	--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Bone LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1.3.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dibarengi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dibentuklah organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.

#### **A. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas**

##### **1. Kepala Dinas**

- (1) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan dekonsentrasi dibidang pembangunan kesejahteraan sosial.



- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Sosial dan kebijakan Bupati;
  - b. perumusan dan penetapan kebijakan, baik yang berkaitan dengan tugas manajerial administratif, maupun teknis operasional dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. pengoordinasian, pengarahan, pembimbingan dan pembinaan staf dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - e. pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian kegiatan;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
  - c. pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang mengikuti umum dan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :
    - a) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
    - b) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
    - c) menyiapkan bahan penyusunan laporan;
    - d) mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
    - e) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja; dan
    - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :
    - a) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
    - b) menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
    - c) menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
    - d) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
    - e) menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
    - f) mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara yang ada;
    - g) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
    - h) menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
    - i) mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
    - j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

- 3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :
  - a) melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
  - b) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - c) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
  - d) melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan
  - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait tugasnya.

### 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang melaksanakan tugas perlindungan dan jaminan sosial.

- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang mempunyai tugas:

- a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan melakukan supervisi serta

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;

c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta menyediakan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang mempunyai tugas:

a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;

b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;

c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial; dan

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga yang mempunyai tugas:

a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan seleksi dan validasi, terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;

- b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait tugasnya.

#### 4. Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan tugas rehabilitasi sosial.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/ atau lembaga;
  - e. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - g. pelaksanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia yang mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
  - c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;
  - d) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - e) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia; dan
  - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik ;
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual;

- c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; dan
  - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.
- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mempunyai tugas:
- a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan /atau lembaga;
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
  - c) melakukan pengelolaan data pelayanan sosial dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - d) melakukan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - e) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/atau lembaga; dan
  - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terkait tugasnya.

## 5. Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang melaksanakan tugas pemberdayaan sosial.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil yang mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;



- c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi terhadap lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan
  - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.
- 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan yang mempunyai tugas:
- a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi terhadap wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/ pusat kesejahteraan sosial, karang taruna dan lembaga kesejahteraan sosial;
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan; dan
  - c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.
- 3) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang mempunyai tugas:
- a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
  - b) melakukan pengelolaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/ kota;
  - c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terkait tugasnya.

## 6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin yang melaksanakan tugas penanganan fakir miskin.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antara negara;
  - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
  - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dipimpin oleh Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas yang mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan kabupaten/kota;
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
  - c) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas; dan
  - d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin terkait tugasnya.

- 2) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan dipimpin oleh Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan yang mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan; dan
  - c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin terkait tugasnya.
- 3) Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial yang mempunyai tugas:
  - a) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
  - b) melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial; dan
  - c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin terkait tugasnya.

#### 7. UPT Dinas

- (1) UPT Dinas dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas sesuai bidang tugas yang diurus.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### 8. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas membantu kepala sub bagian dan/atau kepala seksi terkait bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

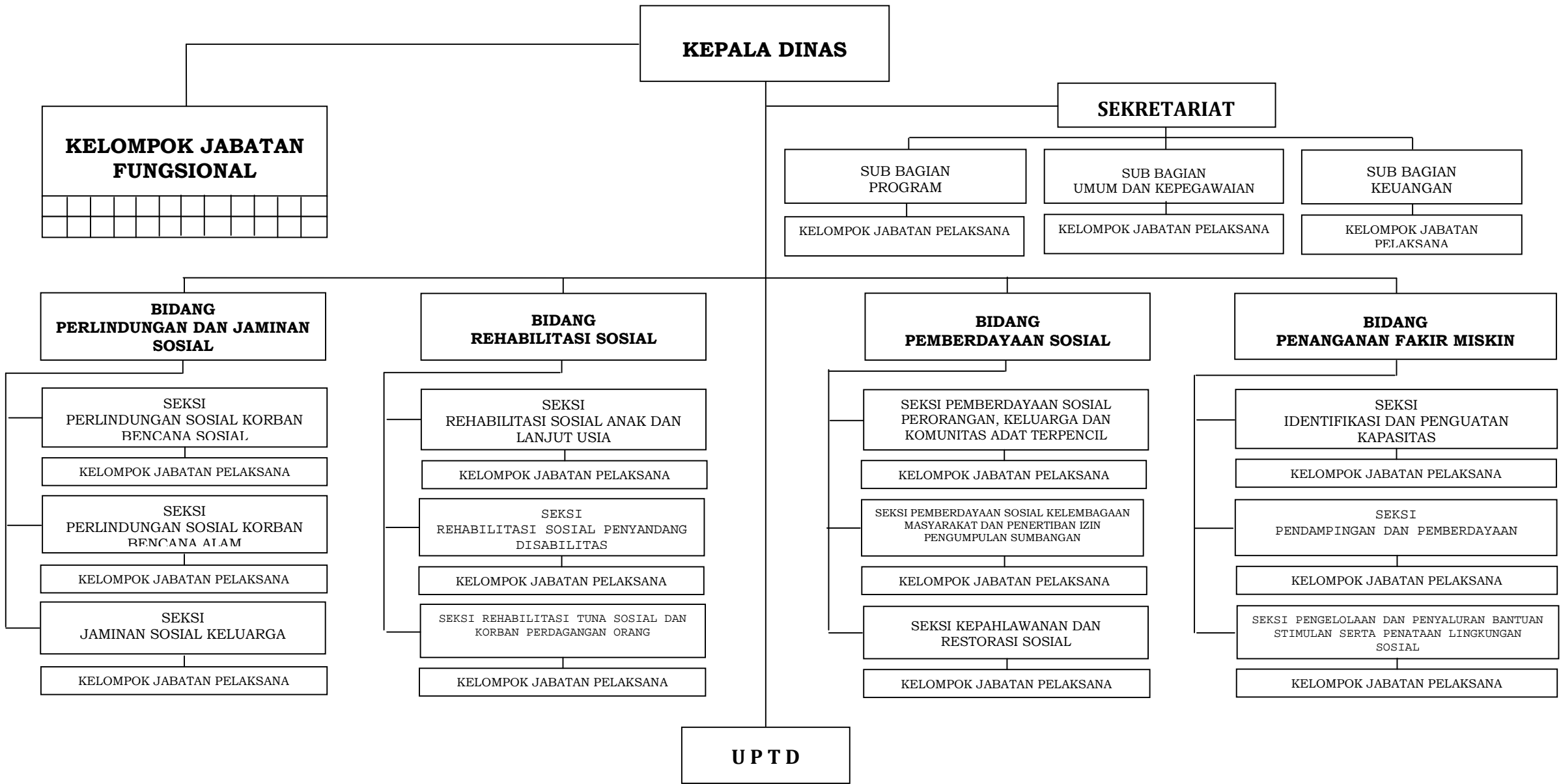
- (1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas Sosial.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas terdiri dari :
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
  1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
  1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
  3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
  2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan
  3. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
  1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

- 2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
- 3. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial
- g. UPTD
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone**



### C. Lingkup Pelayanan

Yang menjadi ruang lingkup Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bone sesuai Struktur Organisasi sebagai berikut :

#### 1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

##### a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tubuh
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Netra
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Rungu Wicara
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Mental
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Penderita Penyakit Kronis

##### b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

- Pelayanan Sosial Anak Balita
- Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak
- Pelayanan Sosial Anak Terlantar
- Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat
- Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Panti
- Pelayanan Sosial Lanjut Usia luar Panti
- Kelembagaan Sosial Lanjut Usia

##### c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Gelandang dan Pengemis
- Rehabilitasi Sosial Tuna Susila
- Rehabilitasi Sosial Bekas Narapidana
- Rehabilitasi Sosial Penyandang HIV / AIDS
- Pencegahan NAPZA
- Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA
- Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang (Trafficking)
- Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasandan Pekerja Migran
- Rehabilitasi Sosial Korban LGBT
- Rehabilitasi Sosial Eks Orang dengan Gangguan Kejiwaan (OdGJ)

#### 2. Bidang Pemberdayaan Sosial

##### a. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan

- Karang Taruna
- Organisasi Sosial (Orsos)
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- Pemanfaatan CSR (Coorporate Sosial Responsibility)

- Kerjasama dan Kemitraan Usaha
  - Pengerahan Dana dan Sumbangan Sosial
  - Administrasi Perizinan Sumber Dana Sosial
  - Pendayagunaan Dana dan Sumbangan Sosial
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
- Identifikasi dan Analisis Bantuan Fakir Miskin
  - Bantuan Usaha bagi Usaha Mandiri Perorangan
  - Bimbingan Usaha bagi Usaha Mandiri Perorangan
  - Bantuan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama
  - Bimbingan Usaha bagi Kelompok Usaha Bersama
  - Pelayanan dan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil dan Masyarakat Terpencil lainnya
- c. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
  - Keluarga Pahlawan, Perintis dan Pejuang Kemerdekaan
  - Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan
  - Penanaman nilai-nilai Solidaritas dan Kesetiakawanan Sosial
  - Jaminan Kesetiakawanan Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- Kesiap-siagaan dan Mitigasi
  - Tanggap Darurat Bencana Alam
  - Identifikasi dan Analisis Korban Bencana Alam
  - Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Alam
- b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Sosial
  - Tanggap Darurat Bencana Sosial
  - Identifikasi dan Analisis Korban Bencana Sosial
  - Rehabilitasi Sosial Korban Bencana Sosial
  - Pemulihan Kondisi Sosial
- c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- Asuransi Kesejahteraan Sosial
  - Kelembagaan Jaminan Kesejahteraan Sosial
  - Program Keluarga Harapan (PKH)



#### 4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

##### a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

- Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM)
- Pengembangan Sistem/Aplikasi Database Kemiskinan SIKS-NG
- Penyajian dan Penyebaran
- Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial
- Penyuluhan Sosial
- Bimbingan teknis dan diklat

##### b. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

- Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat
- Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
- Pengembangan Keserasian Kebijakan Publik dalam Penanganan Masalah-masalah Sosial
- Pendampingan bagi Masyarakat Miskin
- Pemberdayaan Pendamping dan Masyarakat Miskin

##### c. Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial

- Bantuan bagi Masyarakat Perkotaan
- Bantuan bagi Masyarakat Pedesaan
- Bantuan bagi Masyarakat Pesisir
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Kartu Indonesia Sejahtera/Kartu Keluarga Sejahtera

## 2.2 Sumber Daya PD

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan di Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No.		Laki-Laki		Perempuan		Total	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Jumlah Pegawai	24	60	16	40	40	100
2	Golongan						
	Golongan I	-	-	-	-	-	-
	Golongan II	7	70	3	30	10	100
	Golongan III	10	44	13	66	23	100
	Golongan IV	6	86	1	14	7	
3.	Tingkat Pendidikan						
	- SLTP						
	- SLTA	-	-	-	-	-	-
	- Diploma	8	53	6	47	15	100
	III (D3/ Sarjana Muda)	1	50	1	50	2	100
	- Strata 1						
	(S1)/ Diploma IV (D4)						
	Strata 2 (S2)	10	56	8	44	18	100
		4	80	1	20	5	100
4.	Jabatan						
	Eselon II.a	-	-	-	-	-	-
	Eselon II.b	1	100	-	0	1	100
	Eselon III.a	-	-	-	-	-	-
	Eselon III.b	3	75	1	25	4	100
	Eselon IV.a	8	60	6	40	14	93
	Eselon IV.b						

5.	Tenaga Kontrak	3	43	4	57	7	100
6.	Tenaga Sukarela	13	65	7	35	20	100
7.	Pekerja Sosial	-	0	1	100	1	100
8.	Pendamping Sosial dan Operator PKH	68	54	59	46	127	100
9.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	23	85	4	15	27	100
10.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	13	21	49	79	62	100

Selain itu, pada Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menerima Program Nasional melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada mulanya hanya dikembangkan di 10 kecamatan di Kabupaten Bone yang mulai efektif berjalan sejak tahun 2010, namun mulai tahun 2014 hingga sekarang, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencakup 27 kecamatan sehingga telah diadakan perekrutan tenaga pendamping dan tenaga operator sebanyak 4 kali sehingga SDM PKH sudah mencapai 127 orang dengan rincian masing-masing sebagai berikut.

- 1) Pendamping = 117 Orang
- 2) Operator = 8 Orang
- 3) Koordinator Kabupaten = 2 Orang

Pada Dinas Sosial juga memiliki organisasi/lembaga sayap yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dapat membantu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesejahteraan yang ada di daerah yang dikenal dengan nama PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha Kesejahteraan Sosial.

Apabila peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang ada dapat dioptimalkan, maka akan menjadi pionir dalam membantu Pemerintah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PSKS yang dimaksud meliputi :

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
5. Karang Taruna (KT)
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
10. Penyuluh Sosial
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Dunia Usaha

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

Dari sekian banyak jenis pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang telah dibagi habis pada semua Bidang/Seksi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bone sebagaimana telah diuraikan pada poin terdahulu diatas, maka yang menjadi isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Masih rendahnya penanganan Fakir miskin melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Belum adanya data base tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah
- Belum adanya data base tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas

- Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya
- Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Taman Makam Pahlawan (TMP)
- Akibat adanya Pandemi Covid-19, maka kelanjutan Proses Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diawali dengan perekrutan enumerator, Bimtek bagi para enumerator dan sosialisasi bagi para pemangku kepentingan terkait aplikasi sistem informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG/ SIKS droid) menjadi ditangguhkan karena adanya relokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19

## 1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah :

### A. MASSEDI BOLA (Mari Melayani Sesama Dengan Berkeadilan Bersama Orang-Orang Pilihan)

Inovasi ini dibentuk karena adanya Sistem Pelayanan bagi Orang-orang Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang membutuhkan proses yang lama. Tujuan dari pembentukan Inovasi ini adalah untuk mempercepat proses pelayanan baik secara teknis maupun administrasi dalam penanganan khususnya bagi Orang terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya pada umumnya. Manfaatnya untuk memberikan akses yang cepat terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi Orang Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya pada umumnya.

### B. TAGANA MASUK SEKOLAH (Taruna Siaga Bencana Masuk Sekolah)

Inovasi ini dibentuk karena adanya Kejadian Bencana hanya ditangani Orang-Orang terlatih yang tergabung Pada Taruna Siaga Bencana

(TAGANA) yang telah direkrut dan jumlahnya masih sangat terbatas. Tujuan dari pembentukan Inovasi ini adalah untuk merekrut dan menciptakan kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang sukarela dan paham serta mampu melakukan penanganan bencana secara dini seperti kalangan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diharapkan menjadi pilar terdepan yang bergerak baik pada saat Pra dan saat Kejadian Maupun Pasca Bencana. Manfaatnya agar Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dapat menjadi Kader dalam mensosialisasikan tentang pencegahan bencana dan dapat menangani bencana secara dini.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program Dinas Sosial Kabupaten Bone selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

##### **2.1.1 Visi Kepala Daerah**

###### **Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**

Adapun penjelasan Visi tersebut, yaitu :

###### **1. Mandiri :**

kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

###### **2. Berdaya Saing :**

mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

###### **3. Sejahtera :**

mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **2.1.2 Misi Kepala Daerah:**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

### **PROGRAM UNGGULAN**

#### **1. Mandiri**

- a. Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
- b. Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedis
- c. Penerapan inovasi dibidang kesehatan berbasis kearifan lokal
- d. Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
- e. Penerapan inovasi dibidang pendidikan berbasis kearifan lokal
- f. Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas
- g. Program pengentasan kemiskinan by name by address

#### **2. Berdaya Saing**

- a. Program penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan  
Pembangunan dan Pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (Savety Center)
- b. Program pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan



- c. Program Menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia
- d. Program pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota)
- e. Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (Potential Region Dashboard)
- f. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam

### 3. Sejahtera

- a. Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa
- b. Pembangunan pusat ekonomi kawasan kecamatan dan peningkatan bantuan modal usaha bagi industri dan UKMK
- c. Program pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- d. Program pengembangan kehidupan beragama dan pemberian insentif Imam Mesjid dan Guru Mengaji.
- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- f. Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja.
- g. Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin

Khusus bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone jika dikaitkan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Dinas Sosial harus menjalankan visi terkait dengan visi **Mandiri** yang mengandung makna kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan dan **Sejahtera** yang mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga tidak terlepas dari visi kedua yakni visi **berdaya saing**.

Hal ini juga sesuai yang tertuang dalam Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya Misi yang ke-2 (kedua) yakni **“Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.”** dan Misi yang ke-3 (ketiga) yakni **“Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.”**

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk melaksanakan Visi dan Misi PemerintahKabupaten Bone, maka Dinas Sosial Kabupaten Bone sealaku salah satu Perangkat Daerah melakukan penyelarasan secara teknis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone tersebut dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, adapun tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- 1. Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.
- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3

Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Tertangani	Persen	96,55	99,50
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persen	6,06	9,09
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	B	A

2.1.4 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Dinas Sosial Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- Sasaran :
- 1. *Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*
  - 2. *Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan kesejahteraan sosial.*
  - 3. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.*

Tabel 2.1.4  
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	96,55	99,50
	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	87,115	100
	Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	Persen	50	100
	Persentase Disabilitas Fisik Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan	Persen	65,05	98,10
	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani	Persen	19,50	25,15
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social	Persen	6,06	9,09
	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	Areal	1	1
Meningkatnya Akuntabilitas	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	97,08	100

<b>Kinerja Urusan Sosial.</b>	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100
	Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100
	Cakupan Realisasi Laporan Kinerja dan Keuangan	Persen	100	100
	Cakupan Realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum	Persen	100	100

### 2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.1.5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1 : <b>Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Pembinaan Anak Terlantar
	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya
Sasaran 2 : <b>Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial</b>	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial
Sasaran 3: <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.</b>	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur
	Cakupan Realisasi Laporan Kinerja dan Keuangan
	Cakupan Realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Sosial Kabupaten Bone telah

menetapkan PK sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
<b>Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	96,55
	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	87,15
	Persentase Panti Sosial yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	Persen	50
	Persentase Disabilitas Fisik Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan	Persen	65,05
	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani	Persen	19,50
	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social	Persen	6,06
<b>Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial</b>	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	Areal	1

**2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Bone telah menetapkan IKU sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**IKU DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE**

INDIKATOR					SUMBER DATA
SASARAN	KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN		
Meningkatkan Penanganan Penyanggah terhadap Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	Jumlah PMKS yang tertangani	X 100%	Data Kelola Dinas Sosial
			Jumlah PMKS yang ada		
	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persen	Jumlah PSKS yang berpartisipasi	X 100%	Data Kelola Dinas Sosial
			Jumlah PSKS yang Ada sesuai dengan Permensos		

**2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bone,maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.7.207.505.485 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.1**  
**Rencana Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bone TA 2020**

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.895.235.485	54,04
2	Belanja Langsung	3.312.270.000	45,96

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4.2**  
**Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020**

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Penanganan Penyangdang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyangdang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	546.717.200	16,51
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	15.205.000	0,46
		Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan	37.100.000	1,12
		Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	14.950.000	0,45
		Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	219.593.600	6,62
		Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil Lainnya	7.995.000	0,24
		Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	33.200.000	1,00
		Peningkatan Kemampuan (Capacity Bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya	218.673.600	6,60
	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.651.872.800	49,87
		Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan	1.417.113.800	42,78
		Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	88.259.000	2,66
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	45.200.000	1,36
		Pelayanan Sosial Lanjut Usia	9.500.000	0,28
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	38.300.000	1,15



	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.	Program Pembinaan Anak Terlantar	15.450.000	0,46
		Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar	15.450.000	0,46
	Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	11.200.000	0,33
		Pendayagunaan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	11.200.000	0,33
	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	21.475.000	0,64
		Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	21.475.000	0,64
		Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	0	0
	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	42.394.000	1,27
		Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	14.070.000	0,42
		Penyuluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial	17.049.000	0,51
		Pemberdayaan Panti Sosial	11.275.000	0,34
	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial	88.600.000	2,67
		Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	88.600.000	2,67

Pada tabel di atas, dapat dilihat Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada PMKS serta mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone serta peningkatan pelayanan terhadap korban bencana sosial dan bencana alam dimana ada 5 Program/Indikator yang mendukung tercapainya sasaran ini dengan anggaran sebesar Rp. 2.246.715.000 sebesar 67,81 % dari Total Anggaran Belanja Langsung yang dikelola.

Untuk Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta PSKS dalam pelayanan terhadap PMKS serta

penanganan terhadap Taman Makam Pahlawan yang ada di Kabupaten Bone dimana ada 2 Program/indikator yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja dengan anggaran yang dikelolah sebesar 130.994.000 atau sebesar 3,94% dari Total Anggaran Belanja Langsung yang dikelolah.

Dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pencapaian Sasaran 1 dan 2 ada beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

**Tabel 2.4.3**  
**Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2020**

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	612.151.200	18,48
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	53.825.000	1,62
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.884.200	2,29
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.550.000	0,25
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	0,22
		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	272.027.000	0,21
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	154.365.000	4,66
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	40.000.000	
	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	301.551.000	9,18
		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	38.000.000	1,14
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	117.300.000	3,54
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000	0,24
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	33.751.000	1,01
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	97.500.000	2,94
		Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.000.000	0,06

		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	0,15
	Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0	0
	Cakupan Realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan (Persen)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.055.000	0,21
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.055.000	0,21
	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum (Persen)	Program Penunjang Pemerintahan Umum	13.803.800	0,41
		Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	13.803.800	0,41

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Sasaran 1 dan 2 sebesar Rp. 934.561.000,- dengan persentase sebesar 9,8 %.Program/Kegiatan pada table tersebut diatas mendukung dari semua sasaran dan indikator kinerja, sehingga total anggaran Belanja Langsung yang digunakan untuk mencapai target sasaran, tujuan, visi dan misi serta indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone sebesar Rp. 3.895.235.485 atau sebesar 54,04 % dari total Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bone dimana terdapat belanja langsung yang membiayai gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 3.312.270.000 atau sebesar 45,96 %.

**Adapun Refoccurring anggaran**

Adanya refocussing anggaran tahun 2020 akibat pandemi Covid- 19 sehingga terjadi pengurangan anggaran di beberapa kegiatan :

**Tabel 2. 4.4**  
**Anggaran setelah Refoccurring**

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	546.717.200	16,51
		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	15.205.000	0,46
		Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan	37.100.000	1,12
		Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	14.950.000	0,45
		Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	219.593.600	6,62
		Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil Lainnya	7.995.000	0,24
		Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan	33.200.000	1,00
		Peningkatan Kemampuan (Capacity Bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya	218.673.600	6,60
	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.651.872.800	49,87
		Koordinasi Perumusan Kebijakan Dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan Dan Penurunan Kesenjangan	1.417.113.800	42,78
		Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	88.259.000	2,66
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	45.200.000	1,36
		Pelayanan Sosial Lanjut Usia	9.500.000	0,28
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	38.300.000	1,15
		Program Pembinaan Anak Terlantar	15.450.000	0,46

	sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya.	Pengembangan Bakat Dan Keterampilan Anak Terlantar	15.450.000	0,46	
	Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	11.200.000	0,33	
		Pendayagunaan Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	11.200.000	0,33	
	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)	21.475.000	0,64	
		Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	21.475.000	0,64	
		Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	0	0	
Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	42.394.000	1,27	
		Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	14.070.000	0,42	
		Penyuluhan penyandang masalah kesejahteraan sosial	17.049.000	0,51	
		Pemberdayaan Panti Sosial	11.275.000	0,34	
	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	Program Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan Sosial	88.600.000	2,67	
		Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	88.600.000	2,67	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial	Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	612.151.200	18,48	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	53.825.000	1,62	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.884.200	2,29	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.550.000	0,25	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	0,22	
		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	272.027.000	0,21	

		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	154.365.000	4,66
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional	40.000.000	
	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	301.551.000	9,18
		Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	38.000.000	1,14
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	117.300.000	3,54
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000	0,24
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	33.751.000	1,01
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	97.500.000	2,94
		Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2.000.000	0,06
		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	0,15
	Cakupan Realisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur (Persen)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0	0

### Realisasi Jaring Pengaman Sosial (JPS)

Untuk beberapa indikator kegiatan yang tidak tercapai, akan tetapi jenis bantuan dan jaminan sosial yang digantikan dengan jenis bantuan bagi yang terdampak covid-19 dan untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat baik dari APBN melalui kementerian Sosial RI, APBD Provinsi maupun melalui APBD Kabupaten Bone.

- Alokasi APBN
  - ) Bagi Penerima PKH, selain bantuan rutin uang tunai juga mendapatkan tambahan sembako sebanyak 10 Kg /KK selama 3 Bulan
  - ) Bagi Penerima BPNT, selain bantuan rutin sembako juga mendapatkan tambahan bantuan berupa uang tunai 200 ribu/KK selama 3 bulan
- Alokasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan
  - ) Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan sembako bagi 1000 KK
- Alokasi APBD Kabupaten Bone

- ) Jaring Pengaman sosial (JPS) berupa bantuan uang tunai 200 ribu + 5 Kg Beras Bagi 20.276
- ) Jaring Pengaman sosial (JPS) berupa sembako bagi 10.000 KK

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Pengukuran Ordinal**

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % 100%	Baik
3	66 % 75 %	Cukup
4	51 % 65 %	Kurang
5	50%	Sangat Kurang

Secara umum SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja SKPD Dinas Sosial Kabupaten BoneTahun 2020. Dalam Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone terdapat 2 sasaran dengan 7 indikator sasaran.

**Tabel 3.1.2**  
**Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5	BS = 3 B = 2
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Lembaga dalamPelayanan kesejahteraan sosial	2	BS = 2



3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2020

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.1.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	61,49
2.		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
3.		Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	0
4.		Persentase Disabilitas dan Mental potensial yang telah menerima Bantuan dan Pelayanan	100
5.		Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) yang terlayani	0
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Lembaga dalam Pelayanan kesejahteraan sosial.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan Kesejahteraan Sosial	5,05
7.		Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	1

3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bone tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi, maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020 dari Dinas Sosial Kabupaten Bone dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1: Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1

Tabel 3.1.2.1  
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	96,55	61,49	63,69
2.	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	87,15	100,00	114,74
3.	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	50	0	0
4.	Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan	65,05	100,00	153,73
5.	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani	19,50	0	0

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2.2  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	95,15	96,55	98,88	61,49	102,83	63,69
2.		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80,25	87,15	56,18	100	70.00	114,74
3.		Persentase Pantis Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	25	50	25	0	100	0
4.		Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan	48,15	65,05	56,43	100	117.19	153,73
5.		Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani	18,21	19,50	18,12	0	100	0

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra

Tabel 3.1.2.3  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja

No		Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Kinerja	Realisasi Capaiam
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	98,50	61,49	62,43
2.		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	99,75	100,00	100,25
3.		Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	100	0	0
4.		Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan	98,10	100,00	101,94
5.		Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani	25,15	0	0

Pada Pencapaian Indikator Kinerja Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial terlihat telah melebihi Target yang ditetapkan pada Akhir Renstra ini disebabkan Oleh adanya Kegiatan yang mendukung pencapaiannya

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- Permasalahan :
  1. Dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih terkendala dengan belum adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Loka Bina Karya (**Rumah Singgah**) Dinas Sosial Kabupaten Bone. Padahal UPTD Loka Bina Karya (**Rumah Singgah**) sangat besar peranannya sebagai wadah penampungan sementara bagi orang terlantar sebelum dipulangkan ke daerah asalnya; sebagai pusat koordinasi dan *assessment* bagi klan yang bermasalah sosial;
  - b. Pusat Pembinaan dan Pelatihan (**Sao Dècèng**) untuk memberikan latihan keterampilan bagi para PMKS agar nantinya diharapkan mampu hidup mandiri dan mengubah perilaku serta pola pikir agar menjadi manusia yang bermasyarakat dan bermartabat serta dapat mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya yang menjadi modal dalam menjalani kehidupannya.
  - c. Sekretariat bagi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan bagi Koordinator Kabupaten, Supervisor, Pendamping dan Operator
  - d. Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
  - e. Markas bagi Taruna Siaga Bencana (Tagana)
2. Khususnya penanganan masalah tanggap cepat, darurat dan kejadian luar biasa masih terkendala oleh koordinasi satuan-satuan penanganan bencana yang telah dibentuk. Hal ini disebabkan alat komunikasi yang masih terbatas serta mobilitas bantuan terkadang lambat karena tidak adanya alat mobilitas bagi penyaluran bantuan bencana dan alat kelengkapan penanganan bencana lainnya terutama bagi daerah yang berada diluar kota dan di daerah terpencil.
  3. Khusus untuk kegiatan pemberian jaminan sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia tidak produktif memang masih sangat kurang alokasi dari APBD Kabupaten sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial juga masih sangat kurang.
  4. Khusus untuk Persentase disabilitas dan Mental potensial tidak produktif sangat kurang produktif karna adanya *recofussing* anggaran sehingga tidak maksimalnya bantuan yang disalurkan kepada penyandang disabilitas.
  5. Khusus untuk Eks Penyandang Penyakit Sosial tidak mencapai target karna adanya *refocussing* anggaran sehingga tidak adanya bantuan yang diserahkan kepada Eks Penyandang sosial.

- **Alternative/Solusi**

1. Memanfaatkan kondisi dana yang tersedia untuk pelaksanaan semua program/kegiatan dengan mengutamakan kegiatan yang dianggap lebih mendesak dan substantif dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial yang tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Fungsi UPTD Loka Bina Karya (Rumah Singgah) bisa difasilitasi pembangunannya atau dengan mengalihfungsikan salah satu rumah singgah guna peningkatan pembinaan anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya demi peningkatan keterampilan dan jiwa kewirausahaan agar nantinya mereka dapat berwirausaha sehingga permasalahan sosial dapat dikurangi secara perlahan-lahan. Untuk mengarahkan para penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS), maka diberikan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam sebuah loka bina karya
3. Pembangunan Sekretariat yang representatif bagi pelaksana sekretariat bagi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan bagi koordinator kabupaten, supervisor, pendamping dan operator.
4. Pembangunan Sekretariat yang representatif Sekretariat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tagana
5. Perlu ditingkatkan koordinasi antara para satuan penanganan bencana yang ada di daerah yang dianggap rawan bencana dan pengadaan mobil truk untuk operasional dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana.
6. Tidak maksimalnya realisasi indikator kinerja dapat diatasi dengan adanya Jaring Pengaman sosial (JPS) yang berasal dari APBD Kab. Bone, sehingga masyarakat yang terdampak covid-19 bisa terbantu
7. Telah diajukan beberapa kali proposal kepada Kementerian Sosial RI. Dalam Rangka Renovasi Total Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Watampone, namun sampai sekarang belum ada realisasi.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.1.2.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Efesiensi (%)
1.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	62,43	61,49	0,94
2.		Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
3.		Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi sejenis lainnya	0	0	0
4.		Persentase Disabilitas dan Mental Potensial yang telah menerima bantuan dan pelayanan	101,94	100	1,94
5.		Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang terlayani	0	0	0

f. Analisis program dan kegiatan yang menunjang yang menunjang pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja sasaran 1 didukung oleh 5 (lima) program, dengan uraian sebagai berikut:

**01 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 546.717.200,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 364.028.000,-** atau **66,58** persen.

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin Dengan capaian pemenuhan anggaran untu administrasi dan direncanakan 5paket bantuan hibah kepada 5 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Miskin, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***recofusing* anggaran** untuk penanganan ***pandemi covid-19***

2) Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan

Dengan Capaian kelancaran koordinasi dan pelayanan dalam pemberian subsidi bagi sekitar 36.558 Keluarga Harapan/Rumah Tangga Sasaran (RTS) atau 59,589 jiwa di 27 kecamatan yang meliputi:

Tabel 3.1.2.5  
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH

N0	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)	KETERANGAN
1	Ajangale	1.599	
2	Dua Boccoè	1.502	
3	Cenrana	1.413	
4	Tellu Siattingè	1.883	
5	Amali	1.203	
6	Bengo	1.335	
7	Lamuru	879	
8	Lappariaja	1.062	
9	Tellu Limpoè	1.150	
10	Ulaweng	1.563	
11	Bontocani	1.610	
12	Kahu	1.550	
13	Kajuara	1.807	
14	Libureng	1.737	
15	Patimpeng	864	
16	Salomekko	1.051	
17	Tonra	901	
18	Mare	1.592	
19	Ponrè	1.077	
20	Sibuluè	1.796	
21	Cina	1.409	
22	Barebbo	1.417	
23	Palakka	1.344	
24	Awangponè	1.502	
25	Tanètè Riattang Barat	1.017	
26	Tanètè Riattang	812	
27	Tanètè Riattang Timur	1.489	
	Total	33.456	



### 3) Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian 4 paket bantuan hibah kepada 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBe) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

### 4) Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dengan Capaian telah melakukan Pendataan, Verifikasi dan Validasi serta Pemutakhiran dan Sinkronisasi Basis Data Terpadu (BDT) Fakir Miskin terkait dengan Data Penerima BPJS Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dari APBD Kabupaten Bone dan JKN APBN di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.

### 3. Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi serta pemberian 20 paket bantuan hibah Usaha Ekonomis Produktif (UEP) kepada 20 UEP Perorangan/Keluarga bagi Fakir Miskin Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir berupa

- Paket Bantuan Alat Percetakan sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni:
  - 1) Wahyu di Kelurahan Tana Batuè Kecamatan Libureng
- Paket Bantuan Jual Pakan Ayam sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni:
  - 1) Azwar di Jln. Lapawawoi Karaèng Sigèri Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- b. Paket Bantuan Perontok Bulu Ayam sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni:
  - 1) Robin di Jln. Gunung Kinabalu Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- c. Paket Bantuan Usaha Rumput Laut sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Ahmadi di Jln. Kampung Tengah Kelurahan Pallettè Kecamatan Tanètè Riattang Timur
- d. Paket Bantuan Tata Rias sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Hasni Rahman di Jln. M.H. Thamrin Kelurahan Ta' Kecamatan Tanètè Riattang
- e. Paket Bantuan Tata Rias sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Dewi Astini di Jln. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- f. Paket Bantuan Alat Pertukangan sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Amir di Jln. Sukawati Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - 2) Aziz di Desa Lamakkaraseng Kecamatan Ulaweng
- g. Paket Bantuan Alat/Bahan Las sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni

- 1) Umar Nawir di Jln. Manurungè Kelurahan Manurungè Kecamatan Tanètè Riattang
- h. Paket Bantuan Alat Pencucian Motor/Mobil sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni
  - 1) Yusuf di Jln. Sungai Musi Kelurahan Ta' Kecamatan Tanètè Riattang
- i. Paket Bantuan Alat/Bahan Menjahit sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Nurhaeti, S.PdI di Desa Carigading Kecamatan Awangponè
  - 2) Maryanti di Jln. Gunung Kinabalu Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- j. Paket Bantuan Alat/Bahan Jualan Makanan dan Minuman sebanyak 4 paket untuk 4 orang yakni
  - 1) Afridonny di Jln. M.H. Thamrin Kelurahan Ta' Kecamatan Tanètè Riattang
  - 2) Surianti di Jln. H.O.S. Cokroaminoto Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - 3) Daerling di Jln. Sukawati Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - 4) Yuddi Kurniawan di BTN Alda Jln. Sungai Limboto Kelurahan Ta' Kecamatan Tanètè Riattang
- k. Paket Bantuan Alat/Bahan Rumah Makan sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Muh. Amin di Jln. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - 2) Riswandi di Jln. Veteran Kelurahan Watamponè Kecamatan Tanètè Riattang
- l. Paket Bantuan Alat/Bahan Perbengkelan sebanyak 2 paket untuk 2 orang yakni
  - 1) Achmad di Jln. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Macanang Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - 2) Mahmud di Jln. Sungai Musi Kelurahan Ta' Kecamatan Tanètè Riattang

- 3) Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil lainnya

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian 4 paket bantuan hibah kepada 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil lainnya, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

### 3. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya – Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Dengan Capaian koordinasi, pemantauan dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Subsidi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Pengganti Program Rastha bagi Keluarga Miskin bagi sekitar 54.543 Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) / Rumah Tangga Sasaran (RTS) di 27 kecamatan yang meliputi:

**Tabel 3.1.2.6**  
**Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT**

N0	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)	KETERANGAN
1	Ajangale	2.478	
2	Dua Boccoè	2.312	
3	Cenrana	2.156	
4	Tellu Siattingè	3.092	
5	Amali	1.835	
6	Bengo	2.202	
7	Lamuru	1.583	
8	Lappariaja	1.848	
9	Tellu Limpoè	2.033	
10	Ulaweng	2.293	
11	Bontocani	2.054	
12	Kahu	2.172	
13	Kajuara	2.791	
14	Libureng	2.531	
15	Patimpeng	1.183	
16	Salomekko	1.444	
17	Tonra	1.218	
18	Mare	1.987	
19	Ponrè	1.474	
20	Sibuluè	2.430	
21	Cina	2.043	
22	Barebbo	1.939	
23	Palakka	2.092	
24	Awangponè	2.555	
25	Tanètè Riattang Barat	1.644	
26	Tanètè Riattang	1.116	
27	Tanètè Riattang Timur	2.038	
	<b>Total</b>	<b>54.543</b>	

3. Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS lainnya

Dengan Capaian telah melakukan Pemadanan Data Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disandingkan dengan Data Penerima BPJS Jaminan Kesehatan Nasional – Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI) dari APBD Kabupaten Bone dan JKN APBN di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.

4. Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Stimulan

Dengan Capaian telah melakukan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan dalam rangka penyaluran bantuan stimulan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan stimulant lainnya di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone

**06 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 1.651.872.800,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.200.680.800,-** atau **72,69** persen.

1. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di *Trauma Centre* termasuk bagi Korban Bencana  
Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
  - a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* di wilayah Kabupaten Bone
  - b. biaya bahan bakar dan sewa mobilitas untuk penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak *Covid-19* di wilayah Kabupaten Bone
  - c. biaya penyediaan makan minum dan upah kerja bagi Petugas Posko dan Petugas Penyalur Bantuan Penanganan *Covid-19*.
2. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan  
Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
  - a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk kegiatan pemantauan/monitoring dalam rangka verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN BPJS APBD Kabupaten Bone 1 tahun
  - b. Biaya Sosialisasi bagi Pemangku Kepentingan terkait dan Bimbingan Teknis bagi para Enumerator
  - c. biaya pengadaan voucher data internet bagi Enumerator aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG)
  - d. pemberian Upah Kerja bagi 54 orang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) serta Tenaga Ahli seperti Supervisor dan Operator SIKS-NG serta Pengawas Kecamatan.
3. Penanganan Masalah – Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa (KLB)  
Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
  - a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana sosial dan bencana alam di wilayah

- Kabupaten Bone dan daerah lainnya yang terkena bencana nasional gempa bumi selama 1 tahun
- b. biaya sewa mobilitas bagi pengambilan barang bantuan / natura dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan
  - c. pemberian tali asih bagi 40 orang personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) selama 12 bulan
4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
- a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bone selama 1 tahun
  - b. penyediaan belanja makan dan minum bagi Personil dan Tagana
5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia
- Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian 5 Paket bantuan hibah Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lansia produktif kepada 5 Orang Lanjut Usia, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.
6. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- Capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut
- a. penyiapan dana untuk kebutuhan administrasi dan perjalanan dinas untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana sosial di wilayah Kabupaten Bone selama 1 tahun
  - b. penyediaan belanja makan dan minum bagi Personil dan Tagana yang terlibat dalam penanganan bencana sosial.
  - c. Pemenuhan belanja sewa sarana mobilitas (kendaraan darat dan laut) untuk pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya

**02 Pembinaan Anak Terlantar** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 60.000.000,-** atau **100** persen

1) Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Dengan Capaian bimbingan keterampilan kerja (Bimbingan Sosial) di Dinas Sosial Kabupaten Bone bagi 27 Orang Anak Terlantar (Putus Sekolah) yang terdiri dari 24 anak putus sekolah, 2 orang Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan 1 orang anak disabilitas sertapemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar (putus sekolah) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Nirannuang Bulukumba dan Makkarèsò Maros sebanyak 5 paket UEP untuk5 orang berupa:

- 1) Paket Penjahitan sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Halima beralamat di Desa Bulumpare Kecamatan Awangponè;
- 2) Paket Perbengkelan sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Hasriadi Muhlis beralamat di Desa Bulumpare Kecamatan Awangponè;
- 3) Paket UEP Otomotif sebanyak 3 paket untuk 3 orang di;
  - a) Muhammad Irpan Jamil beralamat di Desa Matuju Kecamatan Awangponè
  - b) Ahmad Yani beralamat di Desa Lattèkko Kecamatan Awangponè
  - c) A. Herwin Hidayat beralamat di Desa Lattèkko Kecamatan Awangponè

**03 Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 59.850.000,-** atau **99,75** persen

- 1) Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Dengan Capaian pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan keterampilan di Makassar sebanyak 5 paket untuk 5 orang berupa:

- a) Paket UEP Perbengkelan sebanyak 1 paket atas nama Ruslan (Tuna Daksa/Cacat Tubuh) beralamat di Desa Mattaropuraè Kecamatan Amali;
- b) Paket Ternak Ayam sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Andi Naswarul beralamat di Desa Pasaka Kecamatan Kahu;
- c) Paket Salon/Tata Rias sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Supriadi beralamat di Desa Labuaja Kecamatan Kahu;
- d) Paket Jual-Jualan Campuran sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Agustan beralamat di Desa Mattirowaliè Kecamatan Bèngo;
- e) Paket Pertukangan Kayu sebanyak 1 paket untuk 1 orang yakni atas nama Jumarika beralamat di Desa Pacing Kecamatan Awangponè;

**04 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 75.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 75.000.000,-** atau **100** persen

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang

## Penyakit Sosial

Dengan Capaian Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha dan Bimbingan Mental Sosial bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 20 Orang yang terdiri dari :

1. Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana sebanyak 10 orang
2. Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) sebanyak 10 orang

## 2) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dengan Capaian pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 5 paket untuk 5 orang berupa:

- a. Paket UEP Barang Jualan Campuran sebanyak 3 paket untuk 3 orang Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana :
  - a) Justan beralamat di Desa Mappalo Ulaweng Kecamatan Awangponè
  - b) Rustang beralamat di Jalan Husain Jeddawi Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
  - c) St. Malinda beralamat di Kompleks BTN Tibojong Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanètè Riattang Timur
- b. Paket UEP Jual-Jualan Campuran sebanyak 1 paket untuk 1 orang Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza)
  - a) Asyrav beralamat di Jalan Durian Kelurahan Macègè Kecamatan Tanètè Riattang Barat
- c. Paket UEP Alat Perbengkelan sebanyak 1 paket untuk 1 orang Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) Samsu Alam beralamat di Desa Congko Kecamatan Barebbo

**Pembinaan Anak Terlantar** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 15.450.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 15.450.000,-** atau **100** persen

1. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan

direncanakan bimbingan keterampilan kerja (Bimbingan Sosial) di Dinas Sosial Kabupaten Bone bagi 25 Orang Anak Terlantar (Putus Sekolah) serta pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi anak terlantar (putus sekolah) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan sosial di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Nirannuang Bulukumba dan Makkarèsò Maros sebanyak 5 paket UEP untuk 5 orang, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

**07 Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 59.850.000,-** atau **99,75** persen

1. Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan keterampilan sebanyak 5 paket, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

**08 Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 21.475.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 21.475.000,-** atau **100** persen

1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dengan capaian pemenuhan anggaran untuk administrasi dan direncanakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha dan Bimbingan Mental Sosial bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 20 orang, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Dengan capaian direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (WBLP)/Eks Narapidana dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza (Eks Napza) yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bone sebanyak 5 paket untuk 5 orang, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

**09 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** dengan alokasi anggaran



sebesar **Rp. 42.394.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 42.394.000,-** atau **100** persen

1. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial  
Dengan capaian direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna yang menjadi perwakilan Kabupaten Bone dalam Lomba Desa/Kelurahan, Karang Taruna Berprestasi dan/atau Karang Taruna Aktif Kabupaten Bone sebanyak 1 paket untuk 1 Karang Taruna, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.
2. Penyuluhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
Dengan capaian direncanakan pelaksanaan penyuluhan tentang Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaa Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 5 kecamatan wilayah utara Kabupaten Bone, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.
2. Pemberdayaan Panti Sosial  
Dengan capaian direncanakan pemberian Paket Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pembinaan dan pemberdayaan Panti Sosial yang aktif dan berkinerja baik dalam pembinaan anak asuhan di Kabupaten Bone sebanyak 1 paket untuk 1 Panti Sosial, akan tetapi **tidak terealisasi** karena adanya ***refocusing anggaran*** untuk penanganan ***Pandemi Covid-19***.

**09 Pemeliharaan Areal Pemakaman** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 88.600.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 79.600.000,-** atau **89,84** persen

1. Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan  
Dengan capaian sebagai berikut
  - a. Pemenuhan belanja alat listrik dan bahan bangunan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TPM) Watampone,
  - b. Pemenuhan biaya upah kerja tukang cat sebanyak 3 orang dan Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan (TPM) Watampone sebanyak 3 orang selama 12 bulan
  - c. Pemenuhan biaya makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam rangka Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponè di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kota Watamponè.
  - d. Pemenuhan biaya Konsultansi Penyusunan *Detail Engineering Desain (DED)* dan *Master Plan* dalam rangka persiapan Revitalisasi Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponè di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang

Kota Watamponè yang akan dibiayai melalui Alokasi Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Lembaga dalam Pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.7  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social	6,06 %	5,05%	100%
2.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	1 Areal	1 Areal	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2.4  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi Kinerja			Realisasi Capaiam		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan social	17,53	18,21	6,06	4,03	4,03	5,05	100	100	100
2.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	1	1	1	1	1	1	100	100	100

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Periode Akhir Renstra

Tabel 3.1.2.8

Perbandingan dengan Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Kinerja	Realisasi Capaian
1.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan social	9,09	5,05	55,55
2.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	1	1	100

d. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yaitu :  
Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman, membutuhkan dana yang cukup besar, melihat kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan membutuhkan perbaikan secara total/ renovasi.
2. Solusi yang telah dilakukan yaitu :
  - a. Telah diajukan beberapa kali proposal kepada Kementerian Sosial RI. Dalam Rangka Renovasi Total Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Watampone, namun sampai sekarang belum ada realisasi

02 Peningkatan Peran dan Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan Sosial

Dilaksanakan dalam bentuk Pemeliharaan Areal Pemakaman dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 88.600.000,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 79.600.000,-** atau **89,84** persen

2. Revitalisasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan

Dengan capaian kegiatan pemenuhan belanja alat listrik, bahan bangunan, upah kerja tukang cat, makanan dan minuman serta perjalanan dinas dalam rangka Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponè di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kota Watamponè.

**B. Sasaran 3: *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sosial.***

Nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 dengan Target B. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja didasarkan pada hasil Evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada Tahun 2020, sehingga informasi mengenai realisasi target kinerja untuk tahun 2020 belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020. Adapun pelaksanaan evaluasi Sakip yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah evaluasi terhadap dokumen SAKIP tahun 2019, yang pencapaiannya dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1.11**  
**Pencapaian Indikator Sasaran 3**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tahun Anggaran 2019	B	B	100
2.	Tahun Anggaran 2020	B	- (Belum Dievaluasi)	-

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Tabel 3.1.2.12  
Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan social	B	5,05%	100%
2.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	1 Areal	1 Areal	100%

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2.13  
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi Kinerja			Realisasi Capaiam		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan social	4,03	4,03	5,05	4,03	4,03	5,05	100	100	100
2.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	1	1	1	1	1	1	100	100	100

**c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Periode Akhir Renstra**

**Tabel 3.1.2.14**

**Perbandingan dengan Realisasi Kinerja dengan Periode Akhir Renstra**

No	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Kinerja	Realisasi Capaian
1.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelanan kesejahteraan sosial	9,09	5,05	55,55
2.	Jumlah Areal Pemakaman yang ditangani	1	1	100

**d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Pada Capaian indikator kinerja pada tabel Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP dapat dicapai sesuai target yang ditentukan yaitu predikat B, dengan demikian Sasaran strategis meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Pendapatan Daerah tercapai 100 %. Sebagaimana ditunjukkan dalam indikator kinerja sasaran Tahun 2020 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Periode Tahun 2018-2023.

- Penyebab keberhasilan indikator KinerjaHasil Evaluasi Sakip oleh APIP yaitu :
- Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang ( cascading ) sampai ke eselon terendah ;
  - Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara penghitungannya ;
  - Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja.

REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Penerimaan

Anggaran Pendapatan Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % (Nihil) Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Kabupaten Bone tidak termasuk salah satu Perangkat Daerah (PD) yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 7.207.505.485,- (99,99%)

a. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp.	3.895.235.485,-	(54,04%)
- Belanja Langsung	Rp.	3.312.270.000,-	(45,95%)
- Sumber Dana APBN	Rp.	0,-	(0%)
Jumlah		Rp.	7.207.505.485,- (99,99%)

3. Pemanfaatan Anggaran

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.895.235.485,- (54,04%) yang diarahkan untuk :

) Gaji dan Tunjangan	Rp.	3.895.235.485,-
) Tambahan Penghasilan PNS	Rp	1.054.014.695,-
) Insentif Pungutan Retribusi daerah	Rp	0,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.312.270.000,- (45,95 %) dengan jumlah 12 program dan 34 kegiatan yang terdiri dari 15 kegiatan rutin dan 19 kegiatan substantif/ teknis.

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2020**

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
A.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.895.235.485</b>	<b>3.749.428.787</b>	<b>96,26</b>
	Belanja Pegawai	3.895.235.485	3.749.428.787	96,26
B.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.312.270.000</b>	<b>2.651.556.150</b>	<b>80,05</b>
	Terdiri dari :			
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>612.151.200</b>	<b>545.056.500</b>	<b>96,43</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	53.825.000	44.633.350	77,56
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.884.200	70.824.000	89,33
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8.550.000	8.550.000	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	100
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	272.027.000	272.027.000	100
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	154.365.000	151.355.000	99,45
2.	<b>Program Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>252.810.000</b>	<b>246.369.000</b>	<b>97,45</b>
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	51.000.000	49.700.000	97,45
	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	44.200.000	44.200.000	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	75.760.000	75.760.000	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	74.850.000	69.709.000	93,13
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.000.000	2.000.000	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100
2.	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>28,00</b>
	- pendidikan dan Pelatihan Formal	51.000.000	4.200.000	28,00



No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
3.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>33.714.000</b>	<b>33.714.000</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	33.714.000	33.714.000	100
4.	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	<b>55.000.000</b>	<b>46.130.000</b>	<b>83,87</b>
	Penyusunan Perangkat Daerah	55.000.000	46.130.000	83,87
4.	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>425.000.000</b>	<b>425.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	60.000.000	60.000.000	100
	Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan	80.000.000	80.000.000	100
	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	50.000.000	50.000.000	100
	Pendataan/Pemutakhiran Data Terpadu PMKS dan PSKS	65.000.000	65.000.000	100
	- Penanganan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir	60.000.000	60.000.000	100
	Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil Lainnya	40.000.000	40.000.000	100
	Koordinasi dan Pendampingan Penyaluran Bantuan Sosial.	70.000.000	70.000.000	100
5.	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>318.259.000</b>	<b>305.349.500</b>	<b>95,94</b>
	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Singkrinisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	80.000.000	80.000.000	100
	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	78.259.000	78.259.000	87,34
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	50.000.000	50.000.000	100
	- Pelayanan Sosial Lanjut Usia	60.000.000	60.000.000	100
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	50.000.000	47.000.000	94,00
6.	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	60.000.000	60.000.000	100
7.	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>60.000.000</b>	<b>59.850.000</b>	<b>99,75</b>
	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	60.000.000	59.850.000	99,75

No.	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)
8	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>100</b>
	- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.	75.000.000	75.000.000	100
	- Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	35.000.000	35.000.000	100
10.	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>80.000.000</b>	<b>77.520.900</b>	<b>96,90</b>
	- Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	40.000.000	37.520.900	93,80
	- Pemberdayaan Panti Sosial	40.000.000	40.000.000	100
8.	<b>Program Pemeliharaan Areal Pemakaman</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (TMP)	60.000.000	60.000.000	100
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>3.312.270.000</b>	<b>2.651.556.150</b>	<b>80,05</b>

### 5. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan dan Hambatan
- )

Dalam Rangka Pengembangan dan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Anggaran yang diterima sangat minim yakni **Rp. 3.312.270.000,-** dengan realisasi keuangan **Rp. 2.651.556.150,-** atau **80,05 persen** terutama untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat secara totalitas dan universal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kian kompleks dan penanganan masalah-masalah sosial lainnya. Sedangkan perubahan kondisi sosial yang cepat dan kondisi wilayah yang cukup luas sehingga memerlukan dana yang cukup dan sumber daya yang maksimal untuk menanganinya.
2. Pemecahan Masalah/alternative Solusi.
- )

Memanfaatkan kondisi dana yang tersedia untuk melaksanakan semua program/kegiatan dengan mengutamakan kegiatan yang dianggap lebih mendesak dan substantif dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone pada tahun 2020 adalah sangat baik, karena terdapat 7 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan Rencana Kerja (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bone ke depan diantaranya sinkronisasi antara semua dokumen perencanaan sampai dengan dokumen evaluasi kinerja sehingga dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Lampiran-lampiran :  
Perjanjian klnerja 2021  
IKU

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA  
MISKIN**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA**



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)**

